

# **REKONSTRUKSI KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DALAM PARADIGMA BARU**

Makalah disampaikan dalam Lokakarya Kurikulum  
Matakuliah Pengembangan Kepribadian  
Pada tanggal 18 Mei 2001

Oleh :

Tim Dosen MKPK  
Pendidikan Pancasila

**BAGIAN AIK DAN MKPK BAA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

# REKONSTRUKRI KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DALAM PARADIGMA BARU

## A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketakterdugaan.

Kemampuan warganegara, suatu negara untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (iptek) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar negara tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan serta pegangan hidup warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kepada para mahasiswa calon ilmuwan warganegara Republik Indonesia yang mengkaji dan akan menguasai Iptek dan Seni, menjadi tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan. Kualitas warganegara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping derajat penguasaan Ipteks yang dipelajarinya.

Pendidikan Iptek dan Seni di Perguruan Tinggi Indonesia dirancang dalam kurikulum suatu bidang studi yang memuat dasar-dasar keilmuan dan ketrampilan, mata kuliah keahlian dan perilaku berkarya, sesuai dengan disiplin

sikap, perilaku dan kepribadian peserta didik untuk menyempurnakan pengetahuan, ketrampilan serta efek turutan dari iptek dan seni yang didapatnya.

General Education/ Humanities sebagai pembekalan dasar-dasar sikap, perilaku, di berbagai negara diasuhkan berwujud :

- 1). History, Humanity dan Phylosophy di USA.
- 2). Japanese History, Etics, Phylosophy dan Science Religion di Jepang.
- 3). Phillipino, Family Planning, Taxation and Land Reform, The Phillipine New Cons-titution, dan Study of Human Rights di Phillipina.

Pembekalan kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut di atas, di andalkan pada Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar yang disebut kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi.

Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara Republik Indonesia yang menguasai iptek dan seni tersebut merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Pancasila. Kualitas warga negara tergantung terutama kepada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara disamping pada tingkat serta mutu penguasaannya tentang iptek dan seni. Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup warga bangsa akan benar-benar menjadi sikap dan perilaku warga negara bila mereka dapat merasakan bahwa Pancasila adalah sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan kesehariannya.

## **B. DASAR PEMIKIRAN PENDIDIKAN PANCASILA**

Rakyat Indonesia melalui Majelis Perwakilannya, menyatakan bahwa : Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk "meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha

sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”.

Selanjutnya dinyatakan bahwa : “Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan”.

Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berkepribadian Indonesia.

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Itu berarti Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, harus terus menerus ditingkatkan ketepatan materi instruksionalnya, dikembangkan kecocokan metodologi pengajarannya dan dibenahi efektivitas manajemen pembelajarannya termasuk kualitas dan prospek karier pengampunya.

### **C. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN**

Dalam penjelasan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa : “Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam agama, kebudayaan dan beraneka ragam

kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan di atasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab seorang warganegara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa. Sifat cerdas yang dimaksudkan tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari iptek, etika ataupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Pancasila yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari pesereta didik dengan perilaku yang :

- 1). Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2). Berperikemanusiaan yang adil dan beradab
- 3). Mendukung persatuan bangsa
- 4). Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan
- 5). Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial

Melalui Pendidikan Pancasila, warganegara Republik Indonesia di harapkan mampu : “Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya dapat menghayati Filsafat dan Ideologi Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya”.

Diharapkan melalui Pendidikan Pancasila peserta didik akan menjadi manusia Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang

penguasaan Iptek dan Seni, namun tidak kehilangan jati dirinya dan apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

#### D. DESKRIPSI RUANG LINGKUP MATERI PERKULIAHAN

Ruang lingkup materi Pendidikan Pancasila sebagai respon terhadap perubahan yang disebabkan oleh reformasi memunculkan wajah Pendidikan Pancasila dengan paradigma baru sebagai berikut :

No.	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	JP
1.	Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila	Landasan Pendidikan Pancasila 1. Landasan Historis 2. Landasan Kultural 3. Landasan Yuridis Landasan Filosofis 1. Tujuan Pendidikan Pancasila 2. Tujuan Nasional 3. Tujuan Pendidikan Nasional 4. Tujuan Pendidikan Pancasila	4
2.	Internasionalisasi Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia (Pertumbuhan Paham Kebangsaan Indonesia)	Masa Kejayaan Nasional 1. Masa Kerajaan Sriwijaya 2. Masa Kerajaan Majapahit Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Sistem Penjajahan 1. Perjuangan Sebelum Abad XX 2. Kebangkitan Nasional 1908 3. Sumpah Pemuda 1928 4. Perjuangan Bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 1. Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945 2. Proklamasi Kemerdekaan dan Maknanya 3. Proses pengesahan Pancasila Dasar Negara dan UUD 1945 Perjuangan Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia 1. Masa Revolusi Fisik 2. Masa Demokrasi Liberal 3. Masa Orde Lama 4. Masa Orde Baru 5. Masa Era Global	8
3.	Sistem Hukum Nasional dan Ketatanegaraan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 1. Pengertian Hukum dasar 2. Pengertian UUD 1945 3. Kedudukan UUD 1945 4. Sifat UUD 1945 5. Fungsi UUD 1945 Kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara RI. 1. Makna dan Pembukaan UUD 1945 2. Makna alinea-alinea dalam Pembukaan UUD 1945 3. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 4. Hubungan Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 1. Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara RI	6

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hubungan Negara dan Warga Negara dan HAM menurut UUD 1945</li> <li>4. Lambang-Lambang Persatuan Indonesia</li> <li>5. Perubahan UUD 1945</li> <li>6. Kedudukan Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan</li> </ol>	
4.	Dinamika Pelaksanaan UUD 1945	Dinamika Pelaksanaan UUD 1945 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa Awal Kemerdekaan</li> <li>2. Masa Orde Lama</li> <li>3. Masa Orde Baru</li> <li>4. Masa Era Global/ Reformasi</li> </ol>	2
5.	Pancasila sebagai Sistem Filsafat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cara Berpikir Filsafati</li> <li>2. Pengertian Pancasila secara Filsafati (meliputi aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis)</li> <li>3. Nilai-Nilai Pancasila menjadi Dasar dan Arah Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Azasi Manusia.</li> </ol>	3
6.	Pancasila sebagai Sistem Etika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Nilai, Moral dan Norma</li> <li>2. Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis</li> <li>3. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa dan Negara RI</li> <li>4. Makna Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila</li> </ol>	3
7.	Pancasila sebagai Ideologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Ideologi</li> <li>2. Makna Ideologi Bagi Negara</li> <li>3. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain (Liberalisme dan Sosialisme)</li> <li>4. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka</li> </ol>	2
8.	Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Paradigma</li> <li>2. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ipteks</li> </ol>	4
9.	Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tridarma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Budaya Akademik</li> <li>3. Kampus sebagai Moral Force Pengembangan Hukum dan HAM</li> </ol>	4
Jumlah pertemuan secara keseluruhan dengan bobot 2 SKS selama dalam satu semester			36

**Keterangan :**

J P : Jumlah Pertemuan

Untuk menunjang pengembangan materi perlu di lengkapi dengan fasilitas pustaka/ literatur yang memadai. Diupayakan literatur tersebut mencerminkan suatu perkembangan kondisi yang utuh, baik terbitan sebelum maupun setelah era reformasi. Adapun literatur yang dianjurkan untuk dipergunakan sebagai berikut :

Abdul Malik Fadjar, dkk, 1992, Pancasila Dasar Filsafat Negara Prinsip-Prinsip Pengembangan Kehidupan Beragama, UMM Press, Malang.

Achmad Fauzi DH, dkk. 1983, Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional Dan Segi Filosofis, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang.

Dardji Darmodihardjo, 1979, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Kaelan 2000 Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi. Paradigma.

- Moerdiono, dkk. 1991, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Notonagoro, 1959, Pembukaan UUD 1945 (Pokok-Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia), UGM, Yogyakarta.
- 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- 1980, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Pusat Studi Pancasila UGM, 1999, Reformasi Dalam Perspektif Filsafat, Hukum, Politik, Keamanan, Globalisasi Dan Pembangunan Ekonomi, Jurnalistik Filsafat Pancasila No.3, Yogyakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1992, Kebudayaan Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1970, Beberapa Piran Sekitar Pancasila, Alumni, Bandung.
- Soeroso Prawirohardjo, dkk. 1987, Pancasila Sebagai Orientasi Ilmu, PT BP Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Subandi Al Marsudi, 2000, Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, Rajawali Press, Jakarta.
- Sunoto, 2000, Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Metafisika, Logika Dan Etika, Edisi 3, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.

## **E. METODE PENDIDIKAN PANCASILA**

Dalam melakukan proses belajar mengajar Pendidik jarang sekali menggunakan satu metode karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan proses belajar penggunaan metode yang tepat dan bervariasi akan dapat menimbulkan gairah belajar pada peserta didik. Dalam kenyataan memang tidak ada satu metodepun yang terbaik untuk segala situasi

Metode pengajaran Pendidikan Pancasila dilakukan secara kritis, analitis melalui dialog-kreatif dan bersifat partisipatoris untuk meyakini kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai nilai dasar kebangsaan, ideologi nasional dan dasar negara.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode, yaitu tujuan pembelajaran, efektifitas suatu metode, bahan pembelajaran, kadar CBMA suatu metode dan fasilitas yang tersedia. Teknik CBMA mengandung karakteristik keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Berkenaan dengan metode proses belajar mengajar Pendidikan Pancasila ada tiga metode dalam pembinaan karakter yaitu metode Heuristik, problem solving dan studi kasus, sebagai berikut :

1. Metode Heuristik, digunakan untuk membantu menemukan sesuatu.

Metode ini merangsang peserta didik mencari jawab terhadap persoalan yang dihadapi.

2. Metode problem solving dengan langkah langkah menentukan permasalahan/identifikasi masalah, penentuan paradigma baru untuk pemecahan masalah, menguji kebenaran dengan pengumpulan data/pendapat para ahli, analisis dengan induktif dan deduktif serta merumuskan hasil analisis.
3. Metode studi kasus yaitu mencari pemecahan masalah terhadap problem atau kasus yang sedang dihadapi dengan paradigma yang telah disepakati
4. Disamping itu dapat digunakan berbagai macam metode yang lain, antara lain: ceramah bervariasi, metode tanya jawab, metode diskusi, metode inquiri, metode keteladanan, metode bermain peran, sosio drama, cerita dan dongeng, visualisasi dan sebagainya.

Selain apa yang telah dikemukakan di atas, karena Pendidikan Pancasila termasuk juga pendidikan moral maka dalam pengajarannya juga bisa diintegrasikan pada mata pelajaran lain misalnya mata pelajaran Agama, olahraga, sejarah, sastra dan lain-lain. Dalam hal ini dapat menjadi suatu dilema karena jika menyalak program pendidikan moral secara terpisah maka secara tidak langsung

akan dianggap tidak melaksanakan pendidikan moral secara keseluruhan. Sedangkan kalau mengikuti program pendidikan moral yang diintegrasikan dengan matakuliah yang lain lama kelamaan akan sama dengan menghilangkan pendidikan moral.

Disamping itu dalam metode pengajaran moral dikenal adanya pengajaran moral secara tidak langsung yakni melalui teks pelajaran bahasa atau sastra yang kadang kadang lebih efektif penggunaannya daripada memberi nasehat secara langsung. Dalam pelajaran kesusastraan ditujukan untuk meningkatkan perilaku sopan santun dengan mentransformasikan secara halus. Dengan pengajaran bahasa disamping dapat mengembangkan kemampuan bahasa, daya imajinasi, daya pikir peserta didik, pengetahuan sosial, emosi dan nilai moral anak juga berfungsi melatih kreativitas dan daya kritis peserta didik. Selain itu disamping berupa mata pelajaran pendidikan nilai dan pendidikan moral juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler seperti kegiatan olah raga, korps sukarelawan, klub kesenian dan kegiatan lain yang sifatnya positif.

#### **F. EVALUASI.**

Dalam kegiatan proses belajar mengajar Pendidikan Pancasila penilaian sangat penting. Proses penilaian merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pengajaran. Penilaian untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Penilaian dalam Pendidikan Pancasila tidak mudah karena yang menjadi sasaran adalah mencakup pembinaan dan pengembangan sikap serta perilaku. Aspek afektif yang harus dinilai namun hal-hal yang terdapat dalam ranah afektif bersifat abstrak dan tertutup.

Pada prinsipnya penilaian hasil belajar Pendidikan Pancasila adalah untuk mengukur tingkat pemahaman penguasaan pengetahuan tentang Pancasila, dilakukan dengan cara yang memungkinkan terdeteksinya perkembangan sikap dan tingkah laku mahasiswa.

Untuk metode ini dan teknik penilaian Pendidikan Pancasila yang lebih cocok adalah metode tes yang terdiri dari selain metode tes konvensional yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan para pengajar, juga metode tes psikologis yang

sikap, motivasi dan tes psikologis ) yang tertuju pada kemampuan yang mencakup tes bakat dan kemahiran dan metode non-tes antara lain observasi, wawancara, questioner dan lain-lain.

Dengan menggunakan teknik non-tes dapat berupa: skala bertingkat, skala sikap, chek list, riwayat kelakuan (anekdota record) dan wawancara. Alat ukur keberhasilan belajar non-tes yang sering digunakan adalah: *partitipation charts* (bagan partisipasi), *chek list* (daftar cek), *rating scale* (skala lanjutan) dan *attitude scale* (skala sikap). Kecmpat alat ukur ini mempunyai karakteristik yaitu mengisi alat ukur adalah penilai. Oleh karena itu agar diusahakan tidak terjadi bias pengamat. Dosen melakukan observasi secara individual mengamati, mencatat, mendokumentasi, menganalisis dan akhirnya mengambil kesimpulan. Perpaduan antara penilaian hasil belajar dengan tes/uraian maupun obyektif dan alat ukur keberhasilan belajar non-tes akan menghasilkan kesimpulan yang realistis dan obyektif terhadap sikap perilaku.

Selain itu untuk memperoleh penilaian yang obyektif dapat dikembangkan pendekatan yang dapat dipakai untuk mengetahui sikap seseorang yaitu: (1) Dengan menggunakan laporan diri sendiri; (2) Melalui laporan orang lain; (3)